



© Ananta/BAL

# Angan Partai Rakyat

## Pendahuluan

Seluruh partai politik, tiada kecuali, berupaya menginisiasi peran rakyat secara luas dalam kancah politik lewat berbagai manuvernya. Namun, mengapa rakyat turun ke jalan dan memprotes kebijakan para wakil parlemen yang tiada lain adalah anggota partai—para wakilnya sendiri? Kritik atas partai politik nasional pasca-Reformasi berkuat, setidaknya, pada beberapa hal. *Pertama*, kekuatan politik yang didominasi oleh kelas pengusaha. *Kedua*, kelompok oligarki kelas Kepuluhan yang menguatkan keberpihakan wakil rakyat pada kepentingan kelompoknya sendiri. *Ketiga*, nirkeberpihakan pada kepentingan rakyat.

Dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini, gelombang aksi massa menuntut pembatalan RUU KPK dan RUU Cipta Kerja, pada akhirnya, berbuah nihil. UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 lalu dinilai banyak merugikan rakyat. Usman Hamid dan Ary Hermawan memaparkan setidaknya terdapat tiga alasan mengapa UU Cipta Kerja dinilai sangat merugikan rakyat. *Pertama*, UU Cipta Kerja hanya akan merugikan rakyat secara luas, khususnya bagi mereka yang rentan dan terpinggirkan. *Kedua*, proses UU tersebut dirumuskan, dirundingkan, dan disahkan telah melanggar aturan hukum internasional. *Ketiga*, UU tersebut jelas dirumuskan demi kepentingan elite politik-ekonomi dan perusahaan asing. Secara singkat, UU Cipta Kerja adalah sebuah lisensi untuk kekuasaan mengeksploitasi pekerja dan mengeruk sumber daya alam, hutan-hutan, di mana masyarakat adat menggantungkan hidup kepadanya.<sup>1</sup>

Dalam pemaparan Hamid dan Hermawan, mereka mencatat beberapa kelompok yang paling dirugikan se-

lepas UU ini disahkan, yakni kelas pekerja, petani, dan masyarakat adat. Sebelum UU Cipta Kerja ini digaungkan oleh Jokowi setahun silam, regulasi dan kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan ketiga kelompok tersebut masih jauh dari kata 'menyejahterakan'. Selama pandemi berlangsung, setidaknya YLBHI mencatat terjadi enam belas kali upaya perampasan lahan oleh pemerintah terhadap lahan rakyat.<sup>2</sup> Bukti ini memperpanjang rapor merah pemerintah dalam kasus agraria di Indonesia.

Sayangnya, dari berbagai kasus yang menimpa kelompok tersebut, hampir tidak ada wakil yang merepresentasikan kepentingannya di parlemen. Parlemen di tingkat regional maupun nasional masih didominasi oleh kalangan pengusaha, dan tokoh-tokoh intelektual. Partai-partai nasional yang diisi oleh kelas pengusaha memang bersikap sebagai 'pembela kepentingan rakyat' melalui manuver politik partai maupun para kadernya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), misalnya, populer dengan slogan "partainya *wong cilik*". Namun, nyatanya, berkaitan dengan UU Cipta Kerja, PDIP jadi partai yang paling *ngotot* mendorong disahkannya UU tersebut.<sup>3</sup>

Kekosongan perwakilan ini dapat disinyalir sebagai salah satu penyebab mengapa kelompok pekerja, petani, dan masyarakat adat, terus menjadi bulan-bulanan kebijakan pemerintah. Kelas pekerja pada 1999, 2004, dan 2009 tercatat pernah mengikuti pemilu melalui beberapa partai buruh seperti Partai Buruh, Partai Buruh Nasional, dan Partai Buruh Sosial Demokrasi. Sayangnya, partai yang diisi oleh kelas pekerja ini tidak dapat meraup suara signifikan dalam tiga pemilu tersebut. Padahal, keberadaan partai buruh dinilai dapat menja-

di satu subjek politik penting menentang dominasi kelompok elite pengusaha dan dapat menjadi representasi rakyat secara luas. Tornquist menilai partisipasi buruh dalam politik menjadi krusial dikarenakan peranan kunci mereka dalam meluaskan pemerintahan yang mewakili rakyat, meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat umum, menantang paham elitis, dan mematahkan rumusan yang berbasiskan agama dan batas wilayah.<sup>4</sup>

Organisasi dan serikat memang tumbuh di berbagai kota. Namun, langkah intervensi kebijakan secara formal memang belum ditubuhkan melalui upaya pembentukan partai. Padahal, menurut Aspinall dkk., sejak kejatuhan Orde Baru, partisipasi politik kelompok marjinal menjadi terbuka luas. Melihat bebalnya wakil rakyat dalam merespons tuntutan rakyat secara luas dalam beberapa aksi massa setahun belakangan ini, perlukah rakyat mengorganisasikan dirinya sendiri dan menetapkan sikapnya secara jelas di dalam parlemen? Jika memang hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok rakyat, lantas mengapa ia tetap berjalan di tempat dan belum juga meringkus partisipasi rakyat secara luas dan masif?

### Mengapa partai rakyat diperlukan?

Robison mencatat bahwa pemodal nasional dan asing tidak berada dalam posisi untuk berkecimpung dalam politik nasional secara langsung. Kedua kekuatan kapital ini menyisakan ruang untuk pemerintah sebagai kekuatan yang melakukan mediasi dan sebagai fasilitator yang dapat membentuk kondisi untuk pertumbuhan kapitalisme (akumulasi modal).<sup>5</sup> Dengan demikian, peran pemerintah menjadi begitu krusial untuk melancarkan, membendung, atau bahkan menghentikan proses akumulasi modal kelompok pengusaha interlokal, regional, maupun lokal.

Dari data yang dihimpun Aspinall, pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia meraup keuntungan yang signifikan selama pemerintahan Soeharto. Namun, angka ini justru berbalik pasca runtuhnya Orde Baru. Hasil alam lebih banyak dikelola oleh pihak swasta. Praktis, Indonesia cukup bergantung pada kekuatan modal kelas pengusaha. Fenomena ini ikut mendorong intervensi politik pengusaha dalam percaturan politik Indonesia. Oligarki tambang batu bara yang ramai dibicarakan pada Pilpres 2019 dapat menjadi gambaran kecil mengenai determinasi pengusaha terhadap perpolitikan nasional.<sup>6</sup>

Tanpa adanya kekuatan tandingan yang datang dari elemen pekerja, petani, dan masyarakat adat di parlemen, upaya penolakan terus menemui jalan yang sukar. Sebab, lewat pemaparan Robison, negara masih memaikan fungsi yang sentral dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan tidak adanya perwakilan ini, kebutuhan dan tuntutan pekerja, petani, dan masyarakat adat makin jauh dari proses penentuan kebijakan. Hal ini semakin menjauhkan imajinasi substansial rakyat perihal demokrasi yang dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan semacamnya secara luas.

Dalam catatan Juliawan dan Aspinall, tuntutan pekerja dan kelompok marjinal dalam beberapa kesempatan menemui targetnya dan berhasil mendorong perubahan kebijakan. Hal ini menandakan bahwa kelas pekerja dan kelompok terpinggirkan lainnya memiliki potensi besar untuk mengintervensi langsung kebijakan pemerintah. Namun, sikap 'reaktif' kelompok-kelompok tersebut terhadap kebijakan pemerintah juga bukan

satu-satunya cara pamungkas untuk menciptakan kesejahteraan yang diinginkan. Melihat kasus penolakan UU Cipta Kerja lalu, suara rakyat di luar gedung parlemen hampir tidak menjadi prioritas untuk didengarkan. Sementara, di dalam gedung parlemen, tidak ada wakil yang dapat menentang secara lantang pembahasan dan pengesahan UU tersebut.

Seringkali, kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan baru disadari setelah media ramai memberitakan-nya. Ada keterlambatan respons dari elemen rakyat atas kebijakan pemerintah. Hal ini telah memakan waktu dan energi yang cukup banyak untuk mengumpulkan kekuatan turun ke jalan. Aksi massa adalah salah satu opsi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Aspinall, apa yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah "berpolitik tanpa kelompok *kiri*."<sup>7</sup> Artinya, tidak ada kesatuan kekuatan politik yang dapat sampai ke parlemen dengan membawa suara dan tuntutan rakyat secara luas.

Selain itu, betapa pun partai politik diidentikan dengan pemilihan umum dan segala tetek bengeknya, tidak dapat dilepaskan bahwa partai sangat berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai politik sejatinya dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan apa kehendaknya dengan harapan bahwa ia dapat mewujudkan dalam bentuk formal-prosedural agar dapat diejawantahkan pada kebijakan pemerintah. Ditambah lagi, partai politik adalah representasi atas nilai, norma, dan atau imajinasi politik suatu kelompok. Implikasi nyata dari apa yang Aspinall sebut sebagai "berpolitik tanpa kelompok *kiri*" adalah ketiadaan nilai, norma, dan imajinasi alternatif atas perjuangan dan atau cita-cita politik lain. Politik dipersempit dengan hanya melihat dinamika kampanye dan pemilihan umum yang berserak di media. Singkatnya, hampir seluruh partai politik peserta pemilu di Indonesia menunjukkan karakter sebagai *catch-all party*.<sup>8</sup>

### Mengapa belum juga dapat ditubuhkan?

Mengacu pada hasil penelitian Aspinall dkk., persepsi demokrasi masyarakat dan birokrat di Indonesia menempati pemahamannya yang berbeda.<sup>9</sup> Masyarakat akar rumput memandang demokrasi dari sisi yang paling substansial, sementara para birokrat mengedepankan urusan prosedural. Masyarakat mendambakan kesejahteraan ekonomi sebagai hasil dari proses demokrasi. Sementara itu, urusan legal-prosedural seringkali absen dari fokusnya. Misalnya, lewat temuan Juliawan mengenai aksi protes buruh dalam kurun waktu 2005–2009, buruh, pada umumnya, masih berkuat dengan euforia kebebasan berpendapat sebagai implikasi keruntuhan Soeharto dan memori keberhasilan 1998.<sup>10</sup>

Pada pemilu 1999, 2004, dan 2009, dari beberapa partai buruh yang berhasil ditubuhkan, suara yang di-*raup* belum berhasil menempatkan perwakilan kelas pekerja di parlemen. Aksi protes menjadi satu bentuk intervensi politik paling populer di tengah kelas pekerja, begitu juga dengan elemen rakyat lainnya.<sup>11</sup> Hanya saja, menyingkirkan urusan prosedural dalam pemahamannya atas demokrasi justru berimbas rugi. Pahalanya, para elite politik terus menjadikan kelompok-kelompok termarjinalkan sebagai sesumbar politiknya meraup suara. Sesumbar berakhir sesumbar. Praktiknya, kelas pekerja, petani, dan masyarakat adat selalu kehilangan daya tawarnya dalam menentukan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan dirinya.

Dari faktor internal elemen rakyat, bayangan mengenai intervensi politik langsung dengan langkah le-

gal-prosedural masih jauh dari keterbentukan konsep dan langkahnya. Misalnya, lewat narasi yang dibangun oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di Yogyakarta, berbagai elemen yang tergabung akhir-akhir ini melempar wacana “Bangun Dewan Rakyat!”<sup>12</sup> Dalam simulasinya 11 Oktober 2020 lalu, konsep intervensi politik alternatif ini masih belum dapat menjelaskan langkah praktis dan taktisnya. Simulasi hanya berisi pemaparan kasus kesewenang-wenangan pemerintah terhadap kelompok masyarakat tertentu. Masih belum jelas apakah Dewan Rakyat yang dimaksud oleh ARB adalah sebuah konsep politik alternatif atau sebuah aksi protes mendelegitimasi peran parlemen yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan khalayak luas.

Propaganda dari berbagai aliansi dan gerakan belum beranjak dari hal serupa. Wacana yang didorong masih berupa penolakan keputusan tertentu dan upaya menuntut parlemen untuk segera membenahi kesalahannya. Penolakan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih berada pada tataran aksi protes. Langkah taktis dari aliansi dan gerakan yang meleburkan berbagai elemen masyarakat, masih belum menunjukkan langkah legal-prosedural lewat pembentukan partai politik.

Sebagai ilustrasi, Tornquist menilai imajinasi politik buruh secara khusus dilemahkan oleh dominasi Orde Baru yang berkuasa selama 30 tahun lebih.<sup>13</sup> Hal ini ikut mendorong kecakapan dan proses berkembang serikat-serikat buruh untuk melakukan intervensi politik pada tataran formal prosedural. Belum jauh beranjak ke hal yang prosedural pun, banyak organisasi buruh justru disibukkan dengan masalah internal terkait kematangan mengelola organisasi dan elitisme tokoh organisasi. Ditambah lagi faktor eksternal lain yang menunjukkan belum signifikannya gerakan kelas pekerja ini ditandai dengan survei yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia “Orientasi Politik Buruh dalam Pemilu Legislatif 2009”. Survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas buruh tidak mengetahui keberadaan Partai Buruh, mayoritas buruh tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik terkait visi, misi dan, program (platform) partai politik, dan mayoritas buruh masih menghendaki Serikat Buruh tidak terlibat dalam urusan politik praktis.<sup>14</sup>

### Politik nir imajinasi

Dari berbagai narasi tuntutan, aliansi, dan gerakan menolak UU Cipta Kerja setahun belakangan ini, tidak hadir secara gamblang perencanaan pembentukan partai sebagai salah satu jalan politiknya. Banyak pihak tampak berhati-hati, mencoba mencari jalan keluar lain, atau memang ide itu tidak pernah tumbuh di tengah massa.

Partai dengan cita-cita sosialisme yang dapat menjadi representasi atas kebutuhan kelompok marjinal di Indonesia pun mengalami banyak perpecahan yang membuat kekuatannya ikut melemah. Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang mengambil peran dalam Reformasi 1998 terpecah ke dalam beberapa partai kiri sampai dengan saat ini, yakni Partai Pembebasan Rakyat (PPR) dan Partai Rakyat Pekerja (PRP)—kemudian terpecah melahirkan Komite Penyelamat Organisasi Partai Rakyat Pekerja (KPO-PRP). Perpecahan di tubuh kekuatan kiri yang menjadi patron atas tuntutan kelompok marjinal menjadi satu catatan buruk. Hal ini turut mendorong berbagai aliansi dan gerakan untuk bersikap lebih hati-hati dalam merumuskan kendaraan politiknya.

Ford mencatat bahwa buruh di Indonesia pada periode 2000-an melihat dirinya sebagai kekuatan pengawas

dan pengontrol kerja pemerintah. Pemahaman demikian hadir di tengah buruh di samping kepercayaan bahwa buruh memiliki peran sentral dan dapat melakukan intervensi lebih jauh dalam dinamika politik Indonesia. Di antara elemen masyarakat lainnya, kelas pekerja adalah elemen yang berpotensi signifikan memiliki partai politik. Secara historis, kelas pekerja mencatat rekam jejak yang cukup panjang berada dalam dinamika perpolitikan nasional suatu negara.<sup>15</sup> Sebagian besar negara di Eropa Barat masih memiliki partai buruh yang ikut serta dalam pemilihan umum. Misalnya, Inggris, Partai Buruh—mencalonkan Jeremy Corbyn sebagai Perdana Menteri pada pemilihan umum terakhir—masih eksis hingga saat ini dan menjadi salah satu partai terbesar di Inggris. Beberapa negara lainnya seperti Belanda, Perancis, Jerman, dan beberapa negara Skandinavia masih memiliki partai buruh yang konsisten menjadi peserta pemilihan umum sampai dengan hari ini.

Di Indonesia, gaung partai buruh, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, tidak mendapatkan sahat yang berarti dari publik. Kendati demikian, aliansi dan gerakan yang praktis menjadi pengawal kebijakan negara akhir-akhir ini belum secara gamblang mengampun jalan formal. Sejauh ini, gerakan dan aliansi masih bergerak secara sporadis. Pergerakan yang masif dilakukan oleh gerakan dan atau aliansi di berbagai kota sangat bergantung pada isu-isu yang berkembang. Gerakan dan aliansi yang diisi oleh berbagai elemen itu didorong untuk menjadi ruang cepat tanggap atas situasi yang berlaku. Masalah besar dengan tuntutan yang besar harus tumbang dalam sebuah konsolidasi dan aksi cepat. Cukup berat.

Pengawasan isu pun menjadi begitu berpendar. Padahal, menurut Alayubby, jauh sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kelompok buruh telah lama menjadi bulan-bulanan kebijakan pemerintah Indonesia.<sup>16</sup> Angan kesejahteraan pekerja tidak lantas diluluhlantakan pasca keberadaan UU Cipta Kerja. Sementara itu, kebijakan yang menjauhkan kesejahteraan dari buruh telah ada bertahun lamanya sebelum UU Cipta Kerja yang dibicarakan hari ini. Dengan adanya UU itu, kondisi itu kian diperparah.

Menurut sejarawan Lucian Jaume dan Maurice Agulhon, proses demokratik termaktub dalam pencapaian hak atau dalam penubuhan simbolisme dan prinsip-prinsip politik baru yang merupakan hasil dari pergerakan kemarin dan hari esok.<sup>17</sup> Jika melihat bahwa pergerakan kini berada di tengah-tengah model dan prinsip gerakan kemarin dan hari esok, model dan prinsip seperti apa yang digunakan di hari depan? Apa yang dapat dipelajari dari gerakan rakyat yang masih sporadis dan gagalnya partai buruh mendulang suara di hari kemarin?

Jika reaksi publik atas UU Cipta Kerja menjadi sangat holistik, bahwa keberadaannya telah menjadi ancaman utama bagi kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat, justru kian sulit dengan tidak adanya pengawasan masif yang konsisten dan terunifikasi. Berbagai pergerakan masih berbentuk parsial. Cukup mengkhawatirkan bahwa pola gerakan demikian justru makin menguatkan dugaan Max Lane bahwa pergerakan akhir-akhir ini memang belum masif dan tidak dapat bergerak ke arah yang lebih signifikan.<sup>18</sup>

Boleh jadi, fenomena ini telah mengindikasikan bahwa pergerakan kiwari berada pada bahaya krisis imajinasi politik. Imajinasi menurut, Castoriadis, adalah dimensi sosial dan individu yang membentuk konstruksi atas kemungkinan realitas, selama ia bergantung pada kapasitas imajinatif dan kreatif dari manusia.<sup>19</sup> Imajinasi

adalah dimensi krusial dan sumbu kehidupan sosial. Ia adalah kapasitas kolektif untuk membentuk *forms*, presentasi, dan presentasi diri sebagai seorang manusia atau sebuah masyarakat.<sup>20</sup>

Tentu saja, masyarakat yang mengidamkan wajah substantif dari pemilihan umum demokrasi telah mengimajinasikan sebuah realitas kesejahteraan ekonomi, politik, sosial, dan lainnya bagi diri dan atau kelompoknya. Namun, dengan ketiadaan bayangan formal-prosedural itu, ia hanya menjadi angan belaka. Partai rakyat yang mungkin hadir di tengah oase ini di satu sisi dapat menjadi determinan atas pembentukan imajinasi politik masyarakat. Menurut Diehl, imajinasi ikut mendorong signifikansi atas penubuhan model kepercayaan, mengangkut realitas dari pola keorganisasian yang spesifik, dan menghadirkan persepsi atas dunia.<sup>21</sup>

## Penutup

Keberadaan imajinasi atas cita-cita dan proses politik tidak dapat diubah semata lewat gerakan spontan yang bergantung pada isu-isu khusus. Ia perlu berbentuk sesuatu yang padu dan memiliki proyeksi jangka panjang. Sebab, realitas politik kiwari menghadirkan sedikit sekali ruang bagi rakyat untuk menyuarakan suaranya. Argumen Castoriadis dan Diehl sebelumnya, setidaknya, menuntut sebuah prasyarat, yakni keberadaan sebuah ruang pendidikan politik bagi rakyat. Untuk dapat mencapai kesadaran politik bahwa rakyat adalah subjek aktif atas dinamika kenegaraan, partai rakyat tidak hanya dapat berperan sebagai sebuah 'mesin' politik pemilu, melainkan juga ruang pendidikan politik itu sendiri.

Tentu saja, pekerjaan rumah bagi gerakan rakyat adalah tugas bagi setiap elemen yang menginginkan cita-cita demokrasi itu terwujud. Napas partai politik tidak saja berakhir pada ajang pemilu, melainkan urusan substansial partai sebagai sebuah ruang politik adalah satu hal yang wajib terpenuhi, ruang ini tetap perlu menyasar kesadaran prosedural tadi. Bahwa cita-cita demokrasi dapat ditempuh lewat prosedur tertentu yang menghadirkan 'lawan politik rakyat' dalam satu arena pertempuran. Pada fase ini, seluruh potensi dan waca-

na yang didorong partai rakyat akan bertarung merebut kesadaran masyarakat secara luas.

Akan tetapi, apakah proyeksi atas langkah prosedural itu ikut terbayang dalam cita-cita demokrasi pada tataran politik imajiner sebagian besar dari rakyat saat ini? Partai rakyat, benar, merupakan pengejawantahan komitmen prosedural itu. Namun, dapatkah ia menciptakan karakter politik, meminjam argumen Lefort, yang menunjukkan pemahaman atas tanda-tanda elaboratif imajinasi di mana relasi-relasi sosial diasumsikan untuk diorganisasikan, keluar dari ketergantungan, dan menjadi subjek atas kehendak serta pemahaman atas manusia, serta di sisi lain, tanda-tanda dari kebaruan intelektual, moral, dan religius?<sup>22</sup>

Karakter politik demikian diperlukan untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Tahap yang dapat dilalui lewat berbagai cara menciptakan momentum politik—salah satunya lewat agenda pendidikan politik dan Pemilihan Umum—dengan harapan dapat membawa implikasi pada pembentukan prinsip kesetaraan, kebebasan dan, hak asasi manusia. Dengan demikian, prinsip tersebut telah mengaktifkan imajinasi sosial untuk memahami masyarakat dalam bingkai emansipasi. Dengan kata lain, orang-orang menyadari dirinya sebagai seorang warga sipil yang mengambil bagian dalam proses politik.<sup>23</sup>

Fakta lain menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2002 memuat larangan atas keterbentukan aliansi antara elemen buruh dengan elemen lainnya seperti organisasi petani, dan kelompok intelektual. Ini menunjukkan bahwa realitas politik kiwari menghadirkan sedikit sekali ruang bagi berbagai elemen rakyat untuk menyuarakan suaranya. Padahal, menurut Arif Hermawan, penubuhan aliansi antarelemen buruh, tani, kelompok intelektual dan lainnya menjadi sangat diperlukan demi meningkatkan posisi politisnya dengan kelas pengusaha dan negara.<sup>24</sup> Dengan demikian, dalam konteks politik Indonesia kiwari, penubuhan partai rakyat menjadi krusial dalam upaya mewujudkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Dengan keberadaan partai rakyat ini pula, jalan formal prosedural yang setelah sekian lama absen dari dinamika politik rakyat kini dapat dibayangkan, diperjuangkan dan menemui gelanggang politiknya. **[Fahmi]**

- 1 Usman Hamid dan Ary Hermawan, "Indonesia's omnibus law is a bust for human rights". *New Mandala*, 9 Oktober 2020. <https://www.newmandala.org/indonesias-omnibus-law-is-a-bust-for-human-rights/> diakses pada 29 Oktober 2020.
- 2 Hamid dan Hermawan, "Indonesia's omnibus law is a bust for human rights".
- 3 Tempo, "PDIP akan Bentuk Tim untuk Mendukung Omnibus Law." *Tempo.co*, 7 Maret 2020. PDIP akan Bentuk Tim Kajian untuk Mendukung Omnibus Law - Nasional *Tempo.co* diakses pada 25 Desember 2020 ; Tirta, "Jokowi dan Puan Maharani: Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law. *Tirto.id*, 20 Oktober 2020 Jokowi & Puan Maharani: Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law - *Tirto.ID* diakses pada 27 Desember 2020.
- 4 Olle Tornquist, "Why is Organised Labour Missing from the Democracy Movement?" *Inside Indonesia* 86.
- 5 Richard Robison, Indonesia: *The Rise of Capital* (North Sydney, Allen & Unwin): x.
- 6 Lihat Watchdoc Image, Sexy Killers, Watchdoc. Video (2019) mengenai Pilpres 2019 dan oligarki tambang <https://www.youtube.com/watch?v=qlB7vg4I-To> diakses pada 4 Desember 2020.
- 7 Edward Aspinall, "Still an age of activism," *Inside Indonesia*, 22 Januari 2012. <https://www.insideindonesia.org/still-an-age-of-activism> diakses pada 4 Desember 2020.
- 8 Istilah ini dikemukakan oleh Kircheimer. *Catch-all party* berasal dari partai massa yang sudah kian profesional secara keorganisasian namun menurunkan profil ideologinya untuk menggaet elektabilitas lebih luas alih-alih meraup suara dari kelompok kelas dan basis agama juga sosial. Lihat Andre Krouwel, "Party Models." *Handbook of Party Politics* (London, SAGE): 250.
- 9 Edward Aspinall, dkk, "Elites, masses, and democratic decline in Indonesia," *Democratization* 27(4): 506.
- 10 Benny Hari Juliawan, "Street-level Politics: Labour Protests in Post-authoritarian Indonesia," *Journal of Contemporary Asia*, 41(3): 349–370.
- 11 Juliawan, "Street-level Politics": 355.
- 12 BALAIRUNG, "Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Rakyat Bergerak Serukan Bangun Dewan Rakyat". *Balairungpress*, 21 Oktober 2020. <https://www.balairungpress.com/2020/10/tolak-uu-ciptaker-aliansi-rakyat-bergerak-serukanbangun-dewan-rakyat/> diakses pada 7 Januari 2021.
- 13 Olle Tornquist, "Labour and Democracy? Reflections on the Indonesian Impasse," *Journal of Contemporary Asia* 34(3): 1–4.
- 14 Launa, "Editorial". *Jurnal Sosial Demokrasi* 10 (2011): 10–11.
- 15 Tentang politik buruh, lihat (Amerika Latin) Levitsky dan Mainwaring (2006); (negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur) Borisov dan Clarke (2006); dan (Taiwan dan Korea Selatan) Buchanan dan Nicholls (2003), dan Kong (2004).
- 16 Alfian Al Ayubby, "Sebelum UU Cipta Kerja Disahkan, Situasi Perburuhan di Indonesia Sudah Buruk (Bagian I & II)." *Indoprogress*.
- 17 Lucien Jaume, "Citizen and State under the French Revolution;" (ed.) Q. Skinner dan B. Straht, *In States and Citizens: History, Theory, Prospect* (Cambridge: Cambridge UP): 131–144; M. Agulhon, *Marianne au combat: L'imagerie et la symbolique républicaine de 1789 à 1880* (Paris: Flammarion) dan *Marianne au pouvoir: L'imagerie et la symbolique républicaine de 1880 à 1914* (Paris: Flammarion).
- 18 Max Lane, "Partai Rakyat atau Partai Alternatif: Apa Itu?" *Majalah Balairung* edisi 56: 2 6.
- 19 Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society* (Cambridge: MIT Press): 247.
- 20 Cornelius Castoriadis, *The Imaginary Institution of Society* (Cambridge: MIT Press): 249.
- 21 Paula Diehl "Temporality and the Political Imaginary in the Dynamics of Political Representation". *Social Epistemology*: 6.
- 22 Claude Lefort, "Interpreting Revolution Within The French Revolution," *Democracy and Political Theory* (Cambridge: Polity Press): 93.
- 23 Claude Lefort, "Interpreting Revolution Within The French Revolution," *Democracy and Political Theory*: 93.
- 24 Kanal Pengetahuan FH UGM, Refleksi May Day dari Guru Besar Ketenagakerjaan UGM - Prof. Dr. Arif Hernawan. Video (2018) <https://youtu.be/dEa89TStVQ> diakses pada 12 Januari 2021.